



## **Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015**

**James Hendra Patar Siregar\*, Ernita Arif, Bakaruddin Rosyidi**

Prodi Ilmu Politik, Fakultas FISIP, Universitas Andalas

### **Abstrak**

Kondisi stres narapidana salah satu penyebabnya adalah karena terbatasnya perilaku narapidana akibat kepadatan dan isolasi dari masyarakat, juga terbatasnya ruang personal narapidana, sehingga narapidana cenderung merasa sesak akan kondisi tersebut. Keadaan seperti ini dapat menjadi stressor yang menyebabkan stres pada narapidana. Stres yang dirasakan oleh individu yang menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya. Untuk mengurangi tekanan dan stres yang dirasakan oleh narapidana dilakukan upaya intervensi Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk mencegah kekambuhan pada gangguan depresi dan cemas, dengan menurunkan gejala penyakit melalui modifikasi pikiran dan perilaku negatif. Tujuan dari CBT adalah untuk membantu seseorang untuk memecahkan permasalahan yang ada pada diri seseorang mengenai disfungsi emosional, perilaku dan kognisi secara sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. metode studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitiannya dilakukan secara intensif dan terperinci. Pelaksanaan CBT pada tiga orang subyek dalam penelitian ini berlangsung sebanyak 6 sesi pertemuan, dengan 1 sesi pre-test sebelum melakukan CBT dan Post-test setelah melakukan CBT. Cognitive Behavior Therapy atau Terapi Kognitif-Perilaku dapat digunakan untuk menangani narapidana yang mengalami stres di dalam Lapas Kelas II A Bengkulu, ditunjukkan dari menurunnya skor tingkat stres yang didapatkan dari perbandingan hasil penilaian yang dilakukan sebelum terapi (Pre-test) hingga setelah terapi dilakukan (Post-test).

**Kata Kunci:** Cognitive Behavior Therapy, Stres, Narapidana.

---

\*Correspondence Address : [jimssregar092@gmail.com](mailto:jimssregar092@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v7i2.2020.325-339

© 2020 UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Ciri demokrasi yang konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*)<sup>2</sup>. Pada batang tubuh UUD 45 terdapat pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak warga negara.

Samuel P. Huntington (Labolo dan Ilham, 2015:45), menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam suatu sistem dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara, di mana semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Ciri demokrasi dilaksanakan di Indonesia. Untuk mengisi jabatan-jabatan di legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD) dan di eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah ) dilaksanakan

melalui Pemilihan Umum. Pada awalnya pemilihan Umum di Indonesia hanya memilih anggota legislatif. Namun, sejak amandemen keempat UUD RI 1945, Pemilihan Presiden dilaksanakan langsung. Pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan tahun 2004. Pemilihan kepala daerah langsung dimulai tahun 2005, sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum UU No. 32 tahun 2004, kepala daerah dipilih DPRD di daerah masing-masing. Kepala Daerah dicalonkan parpol atau gabungan parpol dan dipilih anggota DPRD. Keadaan ini menjadikan DPRD sebagai lembaga yang lebih kuat dari kepala daerah, yang menyebabkan ketimpangan perimbangan kekuasaan. Kacung Marijan (2010:183) menjelaskannya sebagai berikut, mengingat penguatan parlemen ternyata tidak serta merta mampu mempercepat proses demokrasi di daerah, dimunculkanlah kerangka kelembagaan baru, yakni adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya 'pembajakan kekuasaan' yang dilakukan oleh partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Di samping itu, Pilkada secara langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat.

Pada Pemilihan langsung kepala daerah, calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini digugat di Mahkamah Konstitusi. Pemohon memasukkan uji materi menyangkut peluang calon perseorangan yang bukan dicalonkan

<sup>2</sup>Miriam Budiarto. 2013 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta Penerbit Gramedia Pustaka, hal 106-107.

oleh partai politik. Melalui putusan No. 005/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada yang hanya membuka pintu bagi calon dari partai politik bertentangan dengan konstitusi<sup>3</sup>. Hal ini menjadi dasar bagi calon kepala daerah mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.

Pemilihan kepala daerah langsung memiliki beberapa manfaat, sebagaimana dijelaskan Joko Prihatmoko dalam Aina (2013:53), sisi positif Pilkada langsung, antara lain: 1) Kepala Daerah akan memiliki mandat dan legitimasi; 2) Pemilu kepala daerah langsung memberikan proses pendidikan politik bagi masyarakat terutama tentang peran debat publik, sistem seleksi calon, visi dan misi, kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi 3) terjadinya *political equality* atau kesetaraan politik terutama dalam hal pemberian suara, proses pembuatan kebijakan maupun dalam melakukan implementasi dan dan evaluasi kebijakan; 4) terdapatnya akuntabilitas publik karena pemilu kepala daerah secara langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat karena kepala daerah yang terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasilnya dan 5) pemilu kepala daerah langsung dapat meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat dan bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara-cara yang efektif. Tujuan utama pemilu kepala daerah langsung adalah

penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas lokal. Di sisi lain, pemilu kepala daerah langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, karena kepala daerah dipilih oleh rakyat itu sendiri.

Pilkada juga mempunyai beberapa kelemahan yang bisa menjadi sumber konflik potensial. Samsuddin Haris mengungkapkan sumber konflik potensial dalam pilkada, yaitu: Konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, dan daerah; Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon Kepala Daerah; Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak; Konflik bersumber dari manipulasi dan kecurangan perhitungan suara hasil pilkada; dan Konflik yang bersumber dari perdebatan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada. Kelemahan lain menurut Kholok dan Kusmiran, penyelenggaraannya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga membebani anggaran<sup>4</sup>.

Pemilihan kepala daerah sempat akan dikembalikan ke cara sebelumnya, dipilih DPRD masing-masing. Hal ini ditandai saat disahkannya UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada tanggal 26 September 2014. Belum diterapkan, Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, isinya mengembalikan pemilihan kepala daerah secara

---

<sup>3</sup> Suharizal 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta. Rajawali Pers, hal 66.

---

<sup>4</sup> Ambo Upe. 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher. hal. 74-77

langsung oleh rakyat<sup>5</sup>. Kemudian Perppu tersebut dibahas DPR hingga akhirnya ditetapkan UU No. 8 Tahun 2015<sup>6</sup>.

Pasal 201 (1) UU No. 8 tahun 2015 berbunyi "Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015". Sesuai UU tersebut, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dibagi tiga gelombang, yaitu tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018. Gelombang pertama, yaitu kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016, diikuti oleh 269 daerah. Salah satu daerah yang termasuk dalam 269 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 adalah Kabupaten Nias Selatan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ini menjadi pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung yang ketiga di Kabupaten Nias Selatan sejak dimekarkan.

Empat pasangan calon ikut pada pilkada Nias Selatan tahun 2015. Seluruh pasangan calon diusung oleh Partai Politik. Keempat pasangan calon tersebut ditetapkan KPU Kabupaten Nias Selatan setelah memenuhi syarat

pencalonan yaitu, minimal 20 % dari 35 kursi di DPRD, atau minimal 7 kursi. Keempat pasangan calon tersebut adalah, nomor urut 1, Lianus Ndruru dan Thomas Dachi, diusung oleh Partai Gerindra yang dengan 7 kursi. Pasangan calon nomor urut 2, Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho diusung gabungan tiga partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 10 kursi. Pasangan calon nomor urut 3, Hilarius Duha, dan Sozanolo Ndruru diusung gabungan tiga partai politik, yaitu Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah 9 kursi. Pasangan calon nomor urut 4, Hadirat Manao dan Ami Hari Hondro, diusung gabungan tiga partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah 9 kursi.

Profil masing-masing peserta pilkada Nias Selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Pasangan calon nomor urut 1, Lianus Ndruru adalah PNS di Kabupaten Nias Selatan, yang mundur dari PNS untuk mengikuti Pilkada Nias Selatan. Wakilnya, Thomas Dachi adalah ketua DPC partai Gerindra dan berprofesi sebagai pengacara, pernah menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan kepulauan Nias. Pasangan calon nomor urut 2, Idealisman Dachi adalah bupati petahana, pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, dan menjadi bupati Nias Selatan periode 2011-2016. Wakilnya, Siotaraizokho Gaho adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten

<sup>5</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presi.den.SBY>

<sup>6</sup><http://m.detik.com/news/berita/2915919/uu-pilkada-belum-dipakai-tapi-tapi-mau-direvisi-2-kali>

Nias Selatan, Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2009-2014 dan 2014-2019, mengundurkan diri untuk ikut Pilkada Nias Selatan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Hilarius Duha adalah pensiunan Polisi dengan pangkat terakhir AKBP, sebelumnya bertugas di Polda Metrojaya, mundur dari kepolisian pada tahun 2015. Wakilnya, Sozanolo Ndruru adalah kader Golkar dan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2009-2014. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Hadirat Manao adalah tokoh pemekaran Kabupaten Nias Selatan, Ketua DPC PAN Kabupaten Nias Selatan, pensiunan tentara dan pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2004-2009, anggota DPRD periode 2009-2014. Wakilnya, Ami Hari Hondro adalah seorang PNS di Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, mundur dari PNS untuk mengikuti Pilkada Nias Selatan.

Berdasarkan kursi parpol pengusung di DPRD, masing-masing calon punya kekuatan yang berimbang. Gabungan parpol paslon nomor urut 2 memiliki kursi terbanyak. Pada setiap paslon terdapat pengurus inti partai politik. Posisi sebagai pengurus partai politik diyakini mampu menggerakkan mesin partai dan konstituen untuk memilih pengurus partai yang ikut bersaing. Hampir semua pengurus partai tersebut punya pengalaman menduduki jabatan melalui pemilihan umum, kecuali ketua DPC partai Gerindra yang merupakan calon wakil bupati nomor urut 1.

Program unggulan bupati petahana adalah pendidikan gratis dan

kesehatan gratis. Banyak pemberitaan mengenai keberhasilan program tersebut, misalnya tahun 2015, Bupati Nias Selatan menerima 111 mahasiswa lulus di bidang kesehatan yang dibiayai Pemkab Nias Selatan di rumah dinas<sup>7</sup>. Bupati Nias juga Selatan memberangkatkan 505 calon mahasiswa bidang kesehatan ke berbagai perguruan tinggi<sup>8</sup>. Terdapat juga dua perguruan tinggi di Telukdalam, ibukota Kabupaten Nias Selatan yang digratiskan biaya kuliahnya, yaitu: STIE Nisel dan STIKIP Nisel yang dikelola Yayasan Pendidikan Nias Selatan dengan jumlah mahasiswa mencapai 3.000 orang. Dalam pelaksanaan program kesehatan gratis, Bupati petahana membentuk petugas Furai URC, yaitu layanan menjemput pasien yang sakit untuk diobati secara gratis<sup>9</sup>. Posisi sebagai petahana memberi keuntungan untuk bertemu dan menggalang dukungan masyarakat. Sementara pesaingnya terdapat unsur ASN dan anggota Polri yang secara aturan tidak dapat terlibat politik praktis, dan baru mengundurkan diri sebelum mendaftar sebagai calon.

Menurut data Perludem, dari 264 Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015, terdapat 151 daerah di antaranya diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana. Dari 151 daerah, 97 di antaranya dimenangkan oleh petahana, 49 petahana mengalami kekalahannya,

---

<sup>7</sup><http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Mahasiswa-Lulus-Biaya-Pemkab-Sampaikan-Terimakasih-Kepada-Bupati-Nisel>

<sup>8</sup><http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Bupati-Nisel-Berangkatkan-505-Calon-Mahasiswa-Kesehatan-Berprestasi>

<sup>9</sup> <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/SMS-Bupati-Nisel--Warga-Sakit-Dijemput-Gratis>

sementara 5 daerah masih belum didapatkan hasil akhir<sup>10</sup>. Selama menjabat, calon petahana melansir program unggulan yang sudah dijalankan, yaitu biaya kesehatan gratis dan pendidikan gratis sampai jenjang perkuliahan. Sedangkan calon lainnya masih menawarkan berbagai program dan kebijakan.

Banyak nama yang muncul sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015. Pada bulan Maret 2015, ada 7 nama yang dibicarakan dan menyatakan diri akan mencalonkan diri. Salah satunya adalah Hadirat Manao. Sementara Sozanolo Ndruru dalam pernyataannya masih menghendaki Bupati Idealisman Dachi kembali maju melanjutkan kepemimpinannya<sup>11</sup>. Dari 7 nama, hanya Hadirat Manao yang ikut sebagai calon Bupati. Sozanolo Ndruru yang awalnya mendukung petahana, mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Artinya, paslon yang akhirnya ditetapkan sebagai paslon bukan yang banyak dibicarakan, sehingga butuh waktu untuk memperkenalkan diri.

Dengan semua keunggulan petahana, hasil pilkada Nias Selatan menunjukkan hasil yang berbeda. Petahana menempati urutan kedua. Pemenangnya adalah paslon nomor urut 3. Perolehan suara masing-masing calon, berurut dari suara tertinggi, adalah: paslon nomor urut 3, sebanyak 48.543 suara, paslon nomor urut 2, sebanyak 41.553 suara, paslon

nomor urut 1, sebanyak 25.909 suara, dan terakhir paslon nomor urut 4, sebanyak 13.123 suara. Tercatat jumlah suara sah sebanyak 129.128 suara.

Kemenangan paslon nomor urut 3, dan kekalahan petahana dapat dianalisis dengan teori perilaku memilih. Menurut teori perilaku memilih, masyarakat menjatuhkan pilihannya karena berbagai faktor seperti kedaerahan dan kekerabatan. Perolehan suara menunjukkan, hampir semua calon memperoleh suara terbanyak di daerah asal masing-masing. Kecuali calon bupati nomor urut 4 dan calon wakil bupati nomor urut 1. Calon Bupati paslon nomor urut 1, Lianus Ndruru yang berasal dari kecamatan Hilimegai, memperoleh suara 687 (95,68 %) suara di desa Bawosaloo Dao-Dao. Calon Bupati nomor urut 2, Idealisman Dachi yang berasal dari Kecamatan Maniamolo, memperoleh 1.392 (91,57%) suara di Desa Hilisimaetano. Calon Bupati nomor urut 3, Hilarius Duha yang berasal dari kecamatan Toma memperoleh 1.150 (93,04 %) suara di Desa Hilisataro. Demikian juga dengan calon nomor urut, Hadirat Manao yang berasal dari Kecamatan Fanayama, memperoleh 1.189 (64,27 %) suara desa Bawomataluo. Dengan asal calon dari kecamatan yang berbeda, memecah suara pemilih.

Faktor berikutnya adalah kekecawaan terhadap kepemimpinan petahana. Kekalahan petahana bisa dianggap sebagai ketidakpuasan pemilih terhadap program yang dijelankannya. Pemilihan yang dimenangkan oleh petahana secara sederhana dapat diartikan bahwa, pemilih masih

<sup>10</sup> Heroik M. Pratama, Maharddhika. 2016. *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015*. Jakarta. Yayasan Perłudem, hal. 37.

<sup>11</sup> <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Pensiunan-polisi--PNS-dan-Pengusaha---Hangatkan-Bursa-Balon-Bupati-Nisel>

menghendaki petahana terpilih kembali. Pilihan ini didasari atas performa kerja selama lima tahun sebelumnya. Dengan kata lain, memilih petahana seorang pemilih memberi *reward* atau penghargaan sekaligus harapan untuk kembali meningkatkan performanya di periode kedua. Sebaliknya, jika performa petahana tidak sesuai harapan, pemilih tidak akan memberikan suaranya kepada petahana sebagai bentuk hukuman atau *punishment*<sup>12</sup>.

. Adnan (2012 : 38) menjelaskan, pada dasarnya perilaku memilih (*voting Behavior*) dalam pemilihan umum adalah tindakan sesaat yang dilakukan seorang pemilih untuk memilih partai politik atau calon tertentu dalam suatu pemilihan umum. Secara umum perilaku memilih dijelaskan dengan 3 pendekatan, seperti dijelaskan oleh Mujani, Liddle, dan Ambardi (2011: 6-33) yaitu, 1. Pendekatan Sosiologis, 2. Pendekatan Psikologis, dan 3. Pendekatan rasional (ekonomi).

## **PERILAKU PEMILIH**

Menurut Surbakti (2010:186) perilaku memilih adalah, keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X atautkah partai kandidat Y. Mengapa pemilih memilih kontestan tertentu dan bukan kontestan lain.

Secara umum perilaku memilih digolongkan menjadi tiga pendekatan yaitu: Pendekatan Sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan

(ekonomi) rasional. Pendekatan sosiologis mempergunakan variabel-variabel pengelompokan sosial untuk menjelaskan preferensi politik pemilih. Pendekatan psikologis memusatkan terhadap tiga aspek, yakni keterikatan terhadap partai politik, orientasi kepada para calon dan, orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Pendekatan ekonomi menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, terhadap calon tertentu<sup>13</sup>.

## **Pendekatan Sosiologis.**

Pendekatan Sosiologis dipelopori oleh biro penerapan ilmu Sosial Universitas Columbia (*Columbia's University Bureau Of Aplied Social Science*), atau lebih dikenal dengan kelompok Columbia. Mengawali penelitiannya tentang voting dengan menerbitkan 2 karya, yakni *People's Choice* (1984) dan *Voting* (1952). Di dalam karya itu diungkapkan, bahwa perilaku politik seseorang terhadap partai politik tertentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain (Lazarsfeld, et al. Dalam Dreyer & Rossenbaum). Inti dari pendekatan sosiologis adalah mempergunakan variabel-variabel pengelompokan sosial untuk

<sup>12</sup> Heroik M. Pratama, Maharddhika, *Op cit*, hal 37.

<sup>13</sup> Kristiadi, Joseph. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1987*. Yogyakarta. Disertasi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, hal :24-34

menjelaskan preferensi politik pemilih (Kristiadi, 1994: 23).

Banyak faktor yang sering digunakan dalam pendekatan sosiologis. Kesarjanaan politik dan pandangan politisi di Indonesia cenderung memberi perhatian secara khusus pada tiga faktor sosiologis, yakni agama, suku bangsa atau etnisitas, dan kelas sosial<sup>14</sup>. Pada masyarakat Nias Selatan, ketiga hal tersebut dapat dinyatakan homogen, baik dari segi agama, suku bangsa dan etnisitas. Namun, bila dilihat sub etnis Nias terdiri dari banyak marga (*mado*) yang berasal dari daerah yang berbeda. Hasil perolehan suara masing-masing calon menunjukkan keunggulan di daerah asal masing-masing.

### **Pendekatan Psikologis**

Studi ini dipelopori oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (University Of Michigan's Survey Research Center). Pendekatan Psikologis memusatkan pada aspek, yakni ketertarikan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang kepada para calon presiden maupun anggota parlemen, dan orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Inti pendekatan psikologis adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan memengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang (Kristiadi, 1994: 28).

Mujani, Liddle, dan Ambardi menjelaskan pendekatan psikologis sebagai berikut (2012: 22), seorang berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres karena tertarik dengan politik, punya

perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

Pada Pemilihan Bupati Nias Selatan, semua calon diusung oleh partai Politik. Pilihan pemilih tidak hanya berdasar kedaerahan calon saja, ada faktor lain, yaitu kualitas calon, kampanye dan identitas kepartaian pemilih. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Penelitian ini membatasi cakupan perilaku memilih dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Variabel yang diteliti adalah faktor kedaerahan, kualitas calon, isu-isu kampanye dan identitas kepartaian pemilih.

### **PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan, antara lain dengan menelaah dokumen resmi penyelenggara pemilu, telaah buku-buku, termasuk dari dunia maya. Kemudian, wawancara kepada informan yang terdiri dari pemilih dan pihak lain yang dianggap mengerti tentang perilaku memilih. Informan dipilih dari daerah asal pasangan calon. Sebanyak 22 orang pemilih diwawancarai. Wawancara dilakukan secara mendalam, untuk mendapatkan hasil yang berimbang. Menurut Taylor wawancara mendalam perlu dilakukan

<sup>14</sup> Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta. Mizan Publica, hal 164.

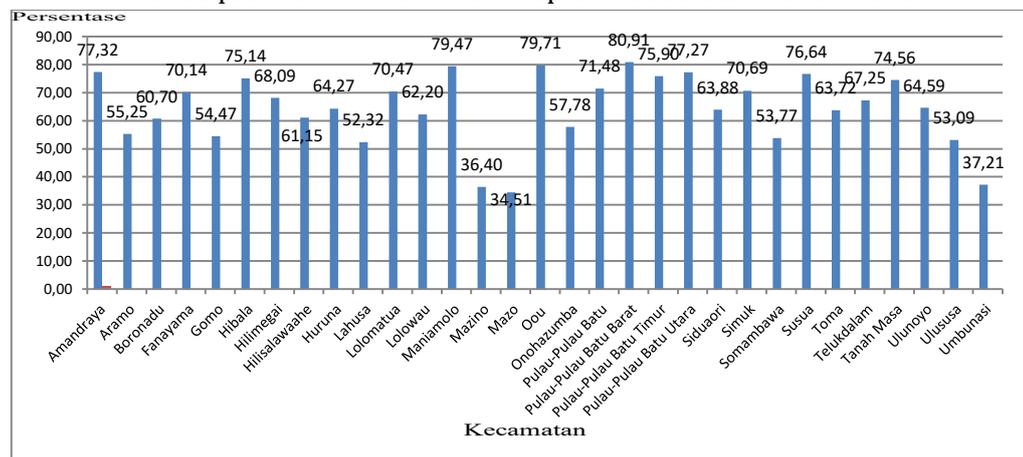
berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang-ulang kali tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama dengan beberapa informan atau dengan informan yang sama. Berulangkali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya dengan tujuan mendalami atau menkonfirmasi informasi (Afrizal, 2014, hal. 136).

diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015. Sebanyak 132.529 pemilih menggunakan hak pilihnya, atau sebesar 63,02% partisipasi pemilih dari 210.295 DPT. Partisipasi tertinggi sebesar 80,91% di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, partisipasi terendah sebesar 34,51% di Kecamatan Mazo. Partisipasi pemilih di kecamatan asal calon diatas rata-rata pemilih Kabupaten, kecuali kecamatan Lolowau. Menunjukkan pemilih mempertimbangkan asal calon.

**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020**

**Grafik1**

**Partisipasi Pemilih Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2015**



Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten Nias Selatan.

Dari informan yang diwawancara diperoleh informasi tentang paslon bupati yang dicoblos saat pemilihan.

Data pilihan tersaji pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Pilihan Informan**

No	Kecamatan	Pasangan Calon				Jumlah	Ket.
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4		
1	Toma	-	-	3	-	3	-
2	Lolowau	1	1	1	-	3	-
3	Telukdalam	-	2	2	-	4	-

4	Maniamolo	-	2	1	-	3	-
5	Hilimegai	3	-	-	-	3	-
6	Hibala	-	-	1	1	3	satu orang pilihannya antara 1 dan 2.
7	Fanayama	1	-	-	2	3	-
Jumlah		5	5	8	3	21	-

Sumber: Wawancara Informan

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pilihan informan hampir mirip dengan perolehan suara hasil rekapitulasi. Pilihan informan terbanyak adalah calon nomor urut 3.

Informan memilih dengan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan informan tersebut dikelompokkan sesuai dengan pendekatan perilaku memilih yang digunakan. Berikut data perilaku memilih informan.

**Tabel 2**  
**Perilaku Memilih**

No	Kecamatan	Perilaku Memilih				Jumlah
		Ikatan Kedaerahan	Identifikasi Partai	Isu-Isu Kampanye	Kualitas Calon	
1	Toma	2	0	1	0	3
2	Lolowau	1	0	1	1	3
3	Telukdalam	0	0	2	2	4
4	Maniamolo	2	0	0	1	3
5	Hilimegai	2	0	0	1	3
6	Hibala	1	0	1	1	3
7	Fanayama	1	0	1	1	3
Jumlah		9	0	6	7	22
%		40,91%	0	27,27%	31,82%	100%

Sumber: Wawancara Informan

Data di atas menunjukkan perilaku memilih informan lebih banyak dipengaruhi ikatan kedaerahan,

kemudian kualitas calon, dan isu-isu kampanye. Identifikasi kepartaian tidak memengaruhi perilaku memilih. Pemilih

melakukan pilihan bukan karena faktor tunggal, seorang melakukan pilihan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya, selain karena kedaerahan, juga memilih karena kualitas paslon.

### **Ikatan Kedaerahan**

Bagi pemilih yang melakukan pilihan karena kedaerahan, ada beberapa alasan memilih pasangan calon sederhana. Alasan tersebut adalah, karena sudah kenal, ada hubungan keluarga dan solidaritas sekampung. Selain itu pemilih juga dipengaruhi oleh tokoh lokal yang mendorong memilih sederhana.

Pada umumnya, pemilih daerah tidak otomatis memilih tanpa adanya motivasi dari pihak lain. Adalah kelompok-kelompok atau organisasi terkait yang punya peran untuk mediasi peran untuk memediasi individu-individu hingga menjadi kekuatan kolektif untuk mendukung partai atau calon tertentu (Wolfinger dan Rosenstone 1996)<sup>15</sup>. Pada Pilkada Kabupaten Nias Selatan, organisasi pemerintahan tradisional *Si ulu dan si Ila*<sup>16</sup> menjadi organisasi pendukung yang menyatukan masyarakat satu daerah untuk mendukung dan memilih calon dari daerah yang sama. Melalui musyawarah yang dikenal dengan *orahu, si ulu* dan *si ila* mengajak masyarakat memilih pasangan calon yang sederhana. Hal ini terlaksana sejak lama, bahkan sebelum penetapan pasangan calon. Hal ini diyakini

memengaruhi masyarakat untuk memilih calon sesuai yang dianjurkan tokoh tersebut. Hal ini diungkapkan oleh informan KL, yang merupakan seorang anggota PPK.

### **Identifikasi Partai**

Pada penelitian ini tidak ditemukan masyarakat yang memilih pasangan calon karena faktor identifikasi partai. Walau masyarakat mengakui mengenal dan menyukai parpol tertentu, mereka tidak memilih berdasarkan parpol pengusung paslon. Sebagian calon yang merupakan kader parpol atau diajukan parpol tertentu, tidak menjadi alasan pemilih dalam menentukan pilihannya..

Kesukaan informan terhadap partai politik bisa karena beberapa hal, seperti ideologi. Namun, kesukaan terhadap partai politik belum tentu menjadi sikap dalam memilih paslon yang diusung parpol. Informan FG mengaku menyukai PDI Perjuangan sejak lama. mengaku mengikuti perkembangan partai tersebut. Menyukai filosofi partai dan alirannya yang Pancasila. Setelah mengetahui bahwa yang diusung PDI Perjuangan adalah petahana, langsung mengalihkan dukungan ke calon yang diusung partai lain.

Keadaan seperti di atas adalah hal yang lazim terjadi, menurut Campbell dkk, Kesukaan seseorang terhadap partai Identitas Partai berada pada tingkat sikap (attitude) bukan berada pada tingkat tindakan atau perilaku. Orang yang mengidentikkan dirinya dengan partai tertentu belum tentu memilih calon yang diusung partai yang

<sup>15</sup>Mujani, Liddle, dan Ambardi, *Op Cit*, hal. 21.

<sup>16</sup>Wiradnyana, Ketut. *Legitimasi Kekuasaan pada Budaya Nias*. 2010. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, hal 161. Tentang struktur sosial suku Nias Pemerintahan tradisional suku Nias, *si Ulu dan Si Ila*

dimaksud<sup>17</sup>. Kesukaan masyarakat terhadap partai politik karena pengaruh partai politik secara nasional, namun tidak dalam politik lokal.

### Isu-Isu Kampanye

Pada pemilihan Pilkada Nias Selatan tahun 2015, isu pendidikan menjadi topik yang hangat di masyarakat. Semua calon memasukkan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai program penting dalam visi-misinya. Hal ini tidak lepas dari klaim keberhasilan pelaksanaan kesehatan gratis dan pendidikan gratis sampai kuliah yang dicanangkan oleh bupati petahana. Bagi pendukung bupati petahana, klaim keberhasilan program sudah benar, pendidikan dan kesehatan gratis sudah berhasil pelaksanaannya dan masyarakat menikmati, bahkan pendidikan gratis bisa dinikmati sampai tingkat sarjana. Menurut mereka, pasangan calon lain hanya meniru program yang sudah ada.

Pasangan calon lain, dalam visi-misinya mengutarakan bahwa, pendidikan gratis maupun kesehatan gratis adalah program yang diamanatkan Undang-Undang. Di Kabupaten Nias Selatan juga sudah ada perda yang mengatur hal tersebut yaitu perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 dan 6 Tahun 2011. Oleh karena itu, pesaing bupati petahana memasukkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis untuk mementahkan klaim bupati petahana, dengan janji pengelolaan yang lebih baik. Kampanye ini mendapat sambutan dari masyarakat. Masyarakat menilai program pendidikan gratis merupakan

program yang sudah diatur dalam perda. Program pendidikan gratis juga banyak kekurangan, sehingga memilih pasangan calon lain dengan janji perbaikan mekanisme pelaksanaan pendidikan gratis. Hal ini dinyatakan informan pemilih OF.

Perbedaan masyarakat dalam menilai kampanye pasangan calon merupakan hal yang wajar. Cara masyarakat menanggapi program yang disampaikan tidak selalu sama. Seperti dikatakan Vernon Bogdanor, isu-isu politik adalah ketidaksamaan pandangan dalam menyikapi masalah-masalah politik<sup>18</sup>.

### Kualitas Calon.

Hampir semua masyarakat pemilih mengenal berbagai hal dari pasangan calon yang dipilih. Beberapa diantaranya adalah, pekerjaan, keberhasilan pada bidang tertentu, dan jabatan yang pernah diemban. Hal lain yang bersifat pribadi, seperti kedermawanan, kebaikan, bagaimana bermasyarakat dan citra positif di masyarakat. Sementara calon yang bukan pilihan pemilih, dikenal dari pekerjaan atau jabatan yang pernah diemban, yaitu: mantan anggota DPRD, mantan anggota DPR RI, polisi, PNS, pengusaha, dan pengurus partai.

Bagi sebagian masyarakat, memilih karena salah satu paslon karena yakin dengan kemampuan calon di masa lalu. Dengan kemampuan calon di masa lalu, masyarakat berharap dan yakin dengan kemampuan pilihannya. Apabila terpilih calon diyakini mampu mewujudkan kemajuan Nias Selatan. Selain itu, kepribadian calon juga menjadi alasan memilih. Informan MW

<sup>17</sup> Mujani, Saiful. Liddle, R. William. Ambardi, Kuskridho. *Op cit* . 375.

<sup>18</sup> Adnan, *Op. Cit.* Hal. 74

yang memilih paslon nomor 4 menyatakan.

Calon adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih. Variabel calon terhadap perilaku memilih dapat dari dua dimensi, yaitu kepribadian dan kepemimpinan. Penelitian Wattenberg dalam pemilihan presiden 2004 menunjukkan faktor kemenangan George W. Bush terhadap John Kerry berdasarkan evaluasi pemilih adalah kepribadian George W. Bush yang lebih menonjol. Dalam dimensi kepemimpinan, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh terhadap perilaku memilih. Penelitian Afan Gaffar menyatakan bahwa kepemimpinan formal dan informal berpengaruh terhadap perilaku memilih. Penelitian Mc Allister dan Clive Bean menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan John Howard berpengaruh pada perilaku memilih<sup>19</sup>. Pada Pilkada Nias Selatan tahun 2015 dimensi kepemimpinan yang ditandai dengan mempelajari rekam jejak calon di masa lampau menjadi pertimbangan pemilih. Sementara dimensi kepribadian menjadi pendukung, yang mempertegas pilihan pemilih.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu ikatan kedaerahan, isu-isu kampanye dan kualitas calon, sedangkan identifikasi partai tidak memengaruhi perilaku memilih. Ikatan kedaerahan menjadi perilkau memilih karena dipengaruhi tokoh lokal *si ulu* dan *si ila* yang mensosialisasikan calon yang berasal dari daerah mereka. Dalam hal kualitas calon dan isu-isu kampanye, pemilih melakukan pilihan berdasarkan rekam jejak calon dan isu yang diyakini pemilih akan bisa diwujudkan calon pilihannya. Sementara *id party* tidak memengaruhi pemilih, kesukaan kepada partai politik tertentu didasari kiprah parati politk secara nasional, sehingga tidak berpengaruh pada pemilihan kepala daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M. Fachri, 2012. *Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang : UNP Press.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka.
- Labolo, Muhammad. Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujani, Saiful. Liddle, R. William. Ambardi, Kuskridho. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta Mizan Publika.
- Pratama, Heroik M. Maharddhika. 2016 *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015*. Jakarta. Yayasan Perludem.
- Suharizal, 2011. *Pemilukada. Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Jakarta. Rajawali Pers.

---

<sup>19</sup>M. Fachri Adnan, 2012. *Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang : UNP Press. 71-72.

- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Penerbit Grafindo.
- Upe, Ambo. 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Wiradnyana, Ketut. *Legitimasi Kekuasaan pada Budaya Nias*. 2010. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Disertasi/ Tesis**
- Aura, Heldo. *Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Kurai pada Pemilu Legislatif tahun 2014*. Padang. Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
- Kristiadi, Joseph. 1994. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1987*. Yogyakarta: Disertasi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Aina. 2013. Perilaku Non Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008-2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah). *Jurnal Humanus*, Vol XII No. 1. Hal. 41-57
- Affan, Heydar. 2015. LSM Perludem Dukung Pilkada Langsung. Dalam *bbc.com*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/09/140908\\_polemik\\_ruupilkada](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140908_polemik_ruupilkada) 8 September 2014. Diakses 28 Juni 2019
- Prakoso, Amriyono. 2014. Tingkat Partisipasi Pilkada Serentak Hanya Capai 64,02 Persen. Dalam *tribunnews.com*: <https://tribunnews.com/nasional/2015/12/16/tingkat-partisipasi-pilkada-serentak-hanya-capai-6402-persen> 16 Desember 2015. Diakses 18 Juni 2019
- Wedhaswary, Inggried Dwi. 2014. *Ini Isi Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY*. Dalam *Kompas.com*: <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presiden.SBY>. 02 Oktober 2014. Diakses 12 Desember 2018
2015. *UU Pilkada Belum Dipakai Tapi Mau DiRevisi 2 kali*. Dalam *m.detik.com*: <http://m.detik.com/news/berita/2915919/uu-pilkada-belum-dipakai-tapi-tapi-mau-direvisi-2-kali15> Mei 2015. Diakses 12 Desember 2018.
2015. Pensiunan Polisi, PNS dan Pengusaha “Hangatkan” Bursa Balon Bupati Nisel. Dalam *hariansib.com*: <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Pensiunan-polisi--PNS-dan-Pengusaha---Hangatkan-Bursa-Balon-Bupati-Nisel> 4 Maret 2015. Diakses 27 Agustus 2019
2015. *Panwaslih Nisel Kabulkan Permohonan Paslon HAM Yang Dianulir KPU*. Dalam *hariansib.com*: <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Panwaslih-Nisel-Kabulkan-permohonan-Paslon--HAM--yang-dianulir-KPU> . 04 September 2015. Diakses 20 Juni 2019.
2015. *Mahasiswa Lulus Biaya Pemkab Sampaikan terima Kasih Kepada Bupati Nisel*. Dalam *hariansib.com*: <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Mahasiswa-Lulus-Biaya-Pemkab-Sampaikan-Terimakasih-Kepada-Bupati-Nisel> 22 Oktober 2015, Diakses 20 Juni 2019.
2015. *Bupati Nisel Berangkatkan 505 Calon Mahasiswa Kesehatan Berprestasi*. Dalam *hariansib.com*: <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Bupati-Nisel-Berangkatkan-505-Calon-Mahasiswa-Kesehatan-Berprestasi> 22 Oktober 2015. Diakses 27 Juni 2019.
2015. *SMS Bupati Nisel, Warga Sakit Dijemput Gratis*. Dalam *hariansib.com*: <http://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/SMS-Bupati-Nisel--Warga-Sakit-Dijemput-Gratis> 24 Mei 2015. Diakses 27 Juni 2019.

**James Hendra Patar Siregar, Ernita Arif, Bakaruddin Rosyidi**

*Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan ... (Hal 325-339)*

Tim Bawaslu. 2016. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015*. Jakarta. Bawaslu RI.

<http://pilkada.2015.kpu.go.id>